

Strategi Counter-Hegemoni Rusia: Analisis Neo-Gramscian atas Kerja Sama Rusia-Myanmar Pasca 2021

Muhammad Zidan Nabil*, Yanyan Mochammad Yani, Siti Aliyuna Pratisti

Universtas Padjadjaran

*e-mail: znabil044@gmail.com

ABSTRAK

Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 memicu krisis politik dan kemanusiaan serta memperdalam polarisasi geopolitik di Asia Tenggara. Di tengah tekanan dan sanksi Barat terhadap junta, Rusia justru meningkatkan kerja sama militer, diplomatik, dan ekonomi dengan Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi counter-hegemoni Rusia yang dipahami sebagai upaya menantang dominasi Barat dengan membangun kemitraan alternatif serta mendorong nilai dan prinsip yang berbeda dalam kebijakan luar negeri terhadap Myanmar pasca 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta analisis dokumen terhadap sumber akademik, laporan internasional, dan data sekunder yang relevan, yang dipadukan dengan pengkodean tematik dan analisis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan Rusia terhadap Myanmar merupakan strategi sistematis untuk melemahkan efektivitas tekanan Barat dengan menyediakan alternatif militer, diplomatik, dan normatif bagi junta. Melalui kerja sama pertahanan, dukungan di forum multilateral, serta penekanan pada prinsip kedaulatan dan non-intervensi, Rusia tidak hanya mempertahankan hubungan bilateral, tetapi juga secara aktif memposisikan diri sebagai penyeimbang terhadap tatanan liberal Barat. Temuan ini menegaskan bahwa Myanmar berfungsi sebagai arena strategis bagi Rusia untuk menguji dan memperluas praktik counter-hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Kesimpulannya, kebijakan Rusia terhadap Myanmar mencerminkan strategi geopolitik yang terintegrasi untuk memperluas pengaruh global sekaligus menantang dominasi norma dan institusi Barat dalam sistem internasional kontemporer.

Kata kunci: Counter-hegemoni; Kebijakan luar negeri Rusia; Kudeta Myanmar 2021; Geopolitik Asia Tenggara.

ABSTRACT

The military coup in Myanmar on February 1, 2021 triggered a political and humanitarian crisis while intensifying geopolitical polarization in Southeast Asia. Amid Western pressure and sanctions against the junta, Russia has instead expanded its military, diplomatic, and economic cooperation with Myanmar. This study aims to analyze Russia's counter-hegemony strategy understood as efforts to challenge Western dominance by building alternative partnerships and promoting different norms in its foreign policy toward Myanmar after 2021. The research employs a qualitative approach with a case study design and document analysis of academic sources, international reports, and relevant secondary data, combined with thematic coding and interpretative analysis. The findings reveal that Russia's support for Myanmar constitutes a systematic strategy to undermine the effectiveness of Western pressure by providing military, diplomatic, and normative alternatives to the junta. Through defense cooperation, support in multilateral forums, and the promotion of sovereignty and non-interference principles, Russia not only sustains bilateral relations but also actively positions itself as a counterbalance to the liberal international order. This study highlights that Myanmar serves as a strategic arena for Russia to test and expand its counter-hegemonic practices in Southeast Asia. In conclusion, Russia's policy toward Myanmar reflects an integrated geopolitical strategy to expand its global influence while challenging the dominance of Western norms and institutions in the contemporary international system.

Keywords: Counter-hegemony; Russian foreign policy; Myanmar coup 2021; Southeast Asian geopolitics.

PENDAHULUAN

Kudeta 1 Februari 2021 mengembalikan kendali penuh militer (Tatmadaw) terhadap struktur negara Myanmar. Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi ditahan, sementara hasil Pemilihan Umum 2020 dibatalkan. Peristiwa ini mempercepat proses autokratisasi yang ditandai dengan konsolidasi kekuasaan junta, represi terhadap oposisi, serta munculnya perlawanan seperti Civil Disobedience Movement (CDM) dan National Unity Government (NUG). Krisis tersebut tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, tetapi juga mendorong isolasi internasional Myanmar (Haacke, 2023).

Amerika Serikat dan Uni Eropa merespons kudeta dengan kecaman diplomatik dan penerapan sanksi ekonomi yang ditargetkan kepada elite militer serta jaringan bisnis yang terhubung dengan Tatmadaw. Dorongan embargo senjata juga disuarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi ruang gerak eksternal junta. Tekanan tersebut memperdalam isolasi diplomatik Myanmar dari negara-negara Barat dan mendorong rezim militer mencari mitra alternatif di luar lingkaran kekuatan liberal-demokratis (Kumar & Kumar, 2025)

Di tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menghadapi dilema antara prinsip non-intervensi dan kewajiban normatif merespons pelanggaran hak asasi manusia. Five-Point Consensus yang dihasilkan merupakan upaya mediasi politik, namun efektivitasnya terbatas karena bersifat *soft law* dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang mengikat. Keterbatasan respons regional ini membuka ruang bagi aktor eksternal non-Barat untuk memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika krisis Myanmar (Caballero-Anthony, 2023)

Dalam konteks tersebut, kerja sama Rusia–Myanmar mengalami peningkatan signifikan. Berbeda dengan pendekatan Barat yang berfokus pada isolasi dan sanksi, Rusia mempererat hubungan diplomatik dan pertahanan dengan junta militer. Myanmar menjadikan Rusia sebagai mitra strategis utama di sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan persenjataan dan pelatihan militer sebagai substitusi atas akses yang terputus dari negara-negara Barat. Dukungan Moskow di Dewan Keamanan PBB, perluasan kerja sama militer-teknis, serta peningkatan interaksi di sektor energi dan pendidikan pertahanan menunjukkan transformasi hubungan bilateral yang semakin erat pasca-2021 (Lakshmanan et al., 2024)

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kerja sama Rusia–Myanmar tidak dapat dipahami semata sebagai relasi pragmatis, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam sistem internasional. Dalam konteks tatanan pasca-Perang Dingin yang masih didominasi norma dan institusi liberal, langkah Rusia dapat dilihat sebagai upaya membangun jaringan alternatif untuk mengurangi dampak sanksi serta menantang dominasi hegemonik Barat (Giles, 2023; Stent, 2024). Dengan demikian, hubungan Rusia–Myanmar mencerminkan praktik *counter-hegemoni* dalam politik global kontemporer (Lucas, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas krisis Myanmar dari perspektif demokratisasi dan autokratisasi, efektivitas sanksi Barat, serta dinamika regional ASEAN. Kajian lain menyoroti hubungan Rusia–Myanmar dalam konteks perdagangan senjata dan kepentingan strategis Rusia di Asia Tenggara. Namun, sebagian besar studi tersebut masih terfragmentasi dan belum secara sistematis mengaitkan kerja sama Rusia–Myanmar dengan dinamika *counter-hegemoni* dalam sistem internasional (Atsetya & Damayanti, 2025).

Berdasarkan celah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kerja sama Rusia–Myanmar pasca 2021 merepresentasikan strategi *counter-hegemoni* Rusia terhadap dominasi Barat dalam sistem internasional? Pertanyaan ini penting untuk memahami hubungan antara praktik kebijakan luar negeri dengan struktur kekuasaan global yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Rusia–Myanmar dalam kerangka neo-Gramscian, dengan fokus pada dimensi resistensi terhadap tekanan hegemonik, pembangunan jaringan alternatif, dan promosi norma tandingan. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi analisis domestik, internasional, dan sistemik dalam satu kerangka teoretis, serta perluasan penerapan perspektif neo-Gramscian dalam konteks Asia Tenggara yang masih relatif terbatas dalam literatur.

Dengan demikian, krisis Myanmar tidak hanya dipahami sebagai konflik domestik atau isu kawasan, tetapi juga sebagai bagian dari kontestasi kekuatan global dalam membentuk ulang

tatanan internasional yang semakin multipolar. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi tentang kebijakan luar negeri Rusia, krisis Myanmar, serta dinamika counter-hegemoni dalam sistem internasional kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi kasus untuk menganalisis Strategi Counter-Hegemoni Rusia dalam kerja sama dengan Myanmar pasca 2021. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, pola relasi kekuasaan, serta konstruksi strategi kebijakan luar negeri secara mendalam dalam konteks politik internasional. Selain itu, metode ini relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kerja sama Rusia–Myanmar merepresentasikan praktik counter-hegemoni dalam kerangka neo-Gramscian (Adlini et al., 2022; Fadli, 2021).

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) dengan memanfaatkan analisis dokumen sekunder. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji dan mensintesis berbagai sumber akademik serta dokumen kebijakan secara sistematis untuk membangun argumen teoritis dan analitis (Hart, 2023). Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Crisis Group, data dari institusi riset pertahanan seperti Stockholm International Peace Research Institute, dokumen resmi pemerintah Rusia dan Myanmar, serta publikasi akademik yang relevan dengan kebijakan luar negeri Rusia, krisis Myanmar, dan teori counter-hegemoni. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi tematik, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian (Hart, 2023)

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Rusia terhadap Myanmar pasca tahun 2021, khususnya dalam bentuk kerja sama militer, diplomatik, dan strategis. Analisis dilakukan dengan menerapkan kerangka neo-Gramscian tentang counter-hegemoni yang menekankan pentingnya relasi kekuasaan, struktur global, dan pembentukan blok historis dalam sistem internasional (Bieler & Morton, 2023). Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama sebagai kategori analisis, yaitu: (1) perlawanan terhadap tekanan hegemonik Barat, (2) pembangunan jaringan kemitraan alternatif, dan (3) promosi norma tandingan seperti non-intervensi dan multipolaritas (Bieler & Morton, 2023). Data kemudian dianalisis secara bertahap melalui reduksi, pengkodean tematik berdasarkan ketiga indikator tersebut, serta interpretasi pola empiris dengan mengaitkannya pada kerangka neo-Gramscian guna menjelaskan manifestasi praktik counter-hegemoni dalam hubungan Rusia–Myanmar.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2024). Pada tahap reduksi, data diklasifikasikan berdasarkan indikator strategi counter-hegemoni. Tahap penyajian dilakukan dengan mengorganisasikan temuan dalam tema-tema utama seperti dukungan militer, perlindungan diplomatik, serta respons terhadap sanksi Barat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif melalui interpretasi keterkaitan antara pola kerja sama Rusia–Myanmar dan dinamika struktur kekuasaan internasional (Miles et al., 2024)

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan evaluasi silang sumber (*cross-checking*) dengan membandingkan data dari berbagai perspektif, baik Barat maupun non-Barat. Prinsip *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dijadikan acuan dalam menjaga kualitas analisis (Lincoln & Guba, 2023). Selain itu, pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh (Yin, 2024) menjadi rujukan metodologis tambahan dalam memastikan konsistensi desain penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menggunakan kerangka counter-hegemoni neo-Gramscian yang memandang hegemoni sebagai dominasi yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan material,

tetapi juga pada legitimasi normatif dan institusional dalam tatanan global (Gramsci, 1971; Cox, 1987). Dalam perspektif ini, counter-hegemoni dipahami sebagai upaya menantang dominasi tersebut melalui resistensi terhadap tekanan hegemonik, pembangunan jaringan alternatif, serta promosi norma tandingan. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kerja sama Rusia–Myanmar pasca 2021 merepresentasikan strategi tanding terhadap hegemoni liberal Barat (Gill, 1993; Morton, 2007).

Dalam konteks krisis politik pasca kudeta, Myanmar menghadapi tekanan signifikan dari negara-negara Barat yang menjadi bagian dari praktik hegemoni liberal dalam sistem internasional. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021, yang dipimpin oleh Panglima Tatmadaw Min Aung Hlaing, menandai berakhirnya proses demokratisasi yang telah berjalan sejak tahun 2011 (BBC News, 2021). Penggulingan pemerintahan sipil yang merupakan hasil Pemilihan Umum 2020 tersebut segera mendapat reaksi keras dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Berbagai sanksi ekonomi dijatuhkan, aset dibekukan, pembatasan visa terhadap pejabat militer diterapkan, serta embargo senjata diberlakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengambilalihan kekuasaan yang dianggap inkonstitusional (European Council, 2021; Pedersen, 2021)

Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya merupakan respons pragmatis semata, melainkan juga mencerminkan kerangka normatif yang menjadi fondasi hegemoni liberal dalam sistem internasional (Mearsheimer, 2001). Semenjak berakhirnya Perang Dingin, demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola sipil telah menjadi standar legitimasi politik global. Dalam logika ini, rezim yang tidak memenuhi standar tersebut dipandang sebagai penyimpangan dari tatanan internasional yang “sah” dan dengan demikian layak mendapat tekanan dari komunitas internasional (Huntington, 1993)

Dalam perspektif neo-Gramscian, hegemoni tidak semata-mata beroperasi melalui dominasi militer atau ekonomi, melainkan juga melalui konsensus normatif dan institusional sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam *Selections from the Prison Notebooks* (Gramsci, 1971) dan dikembangkan dalam studi Hubungan Internasional oleh Robert W. Cox (Cox, 1987). Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya memanfaatkan institusi internasional, rezim sanksi, serta tekanan diplomatik sebagai instrumen untuk mempertahankan tatanan liberal. Respons terhadap Myanmar ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan isolasi politik dan ekonomi terhadap rezim yang dianggap melanggar norma global (Ikenberry, 2011)

Tekanan tersebut semakin diperkuat melalui upaya delegitimasi diplomatik di forum multilateral, termasuk pembahasan resolusi di Dewan Keamanan United Nations Security Council dan pembatasan representasi junta dalam berbagai forum internasional (ASEAN, 2021; European Council, 2021). Secara struktural, tindakan-tindakan ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak eksternal Myanmar serta meningkatkan biaya politik bagi militer agar terdorong melakukan kompromi atau transisi kembali ke pemerintahan sipil (Perry, 1991)

Akan tetapi, efektivitas mekanisme hegemonik ini sangat bergantung pada konsistensi dan solidaritas internasional. Hegemoni liberal hanya dapat bekerja secara optimal apabila mayoritas kekuatan besar di dunia mendukungnya (Keohane & Nye, 2012). Ketika terdapat aktor global yang menolak atau tidak berpartisipasi dalam tekanan tersebut, maka daya paksa sanksi menjadi relatif terbatas. Dalam konteks Myanmar, ketidakterlibatan Rusia dan Tiongkok dalam rezim sanksi Barat menciptakan celah yang signifikan dalam struktur tekanan internasional (Lankov, 2022)

Di samping itu, Myanmar memiliki nilai strategis secara geopolitik di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan wilayah persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik (Weatherley et al., 1987). Posisi geografis ini menjadikan krisis domestik Myanmar tidak terlepas dari dinamika persaingan kekuatan besar (Freeman, 1986). Dengan demikian, tekanan Barat terhadap junta tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya normatif mempertahankan demokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan global yang lebih luas (Buzan & Wæver, 2003)

Dalam situasi inilah peran Rusia menjadi sangat signifikan. Ketika Barat berupaya mengisolasi junta melalui sanksi dan delegitimasi, keberadaan Rusia sebagai mitra strategis

alternatif melemahkan efektivitas tekanan tersebut (Reuters, 2022). Dengan kata lain, krisis Myanmar tidak hanya mencerminkan persoalan politik domestik, melainkan juga memperlihatkan bagaimana struktur hegemoni liberal menghadapi tantangan dalam sistem internasional yang semakin multipolar (Zakaria, 2008)

Temuan utama pada bagian ini menunjukkan bahwa tekanan Barat terhadap Myanmar merupakan manifestasi dari praktik hegemoni liberal yang mengandalkan sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan legitimasi normatif berbasis demokrasi. Namun, efektivitas tekanan tersebut tidak sepenuhnya optimal karena tidak didukung oleh konsensus global. Ketidakterlibatan aktor besar seperti Rusia dan Tiongkok menciptakan celah dalam struktur hegemonik, yang kemudian dimanfaatkan oleh Rusia untuk membangun dan memperkuat relasi strategis dengan junta militer Myanmar.

Berbeda dengan pendekatan negara-negara Barat yang menerapkan sanksi ekonomi, pembatasan diplomatik, dan embargo senjata terhadap Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021, Rusia justru mempertahankan bahkan memperdalam hubungan strategisnya dengan junta militer yang dipimpin oleh Senior General Min Aung Hlaing. Moskow tidak mengeluarkan kecaman keras atas pengambilalihan kekuasaan oleh Tatmadaw dan tetap menjalin komunikasi tingkat tinggi secara intensif. Min Aung Hlaing beberapa kali melakukan kunjungan resmi ke Rusia, termasuk menghadiri forum militer internasional yang diselenggarakan pemerintah Rusia dan bertemu pejabat pertahanan senior. Intensitas interaksi ini mencerminkan kesinambungan sekaligus penguatan kerja sama bilateral di tengah tekanan Barat (BBC News, 2022; Radio Free Asia, 2023)

Dalam sektor pertahanan, Rusia menjadi salah satu pemasok utama persenjataan bagi Myanmar. Berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada periode 2012–2021 Rusia menyumbang sekitar 25–35 persen dari total impor senjata Myanmar, menjadikannya mitra pertahanan yang sangat signifikan bagi Tatmadaw. Persenjataan yang dipasok mencakup jet tempur MiG-29, pesawat latih tempur Yak-130, helikopter serang Mi-35, serta sistem pertahanan udara Pantsir-S1. Setelah 2021, kerja sama ini berlanjut melalui pengiriman peralatan militer, pemeliharaan teknis, dan pelatihan personel, yang menunjukkan keberlanjutan dukungan militer Rusia di tengah isolasi internasional terhadap junta (Saunders, 2024; SIPRI, 2022)

Selain pengadaan alutsista, kerja sama pertahanan juga meliputi pendidikan dan pelatihan perwira Myanmar di akademi militer Rusia. Hubungan ini menciptakan ketergantungan teknis jangka panjang karena sistem persenjataan Rusia membutuhkan dukungan suku cadang, pelatihan, serta interoperabilitas berkelanjutan. Pada 2023, kedua negara menyelenggarakan latihan angkatan laut bersama di Laut Andaman, menandai perkembangan relasi dari sekadar transaksi senjata menuju interaksi operasional militer yang lebih intensif dan terstruktur. Transformasi ini menunjukkan bahwa relasi pertahanan Rusia–Myanmar telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang lebih mendalam (The Irrawaddy, 2023; Jane's Defence Weekly, 2023).

Di luar sektor militer, hubungan bilateral juga berkembang dalam bidang energi dan teknologi strategis. Pada 2022–2023, Myanmar dan Rusia menyepakati kerja sama pengembangan tenaga nuklir sipil melalui badan energi nuklir negara Rusia, Rosatom, termasuk rencana pembangunan reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) untuk memenuhi kebutuhan energi domestik Myanmar. Kerja sama ini menandai perluasan relasi ke sektor berteknologi tinggi yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap ketergantungan teknologis, transfer keahlian, dan institusionalisasi hubungan kedua negara (Reuters, 2022; Rosatom, 2023)

Dalam ranah diplomatik, Rusia juga memberikan dukungan politik bagi Myanmar di forum internasional, terutama di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Moskow menentang upaya resolusi yang mengarah pada sanksi komprehensif atau tindakan koersif terhadap junta militer. Bersama Tiongkok, posisi Rusia secara efektif membatasi pembentukan tekanan multilateral yang lebih keras terhadap Myanmar. Dukungan ini berfungsi sebagai perlindungan institusional yang mengurangi potensi isolasi total Myanmar dalam sistem internasional (Mosyakov et al., 2024; Patrick et al., 2023)

Dengan demikian, Isolasi internasional terhadap junta Myanmar tidak bersifat absolut, melainkan relatif karena adanya dukungan dari aktor alternatif. Rusia berperan sebagai mitra strategis yang menyediakan dukungan militer, teknologi, dan diplomatik, sehingga memungkinkan rezim mempertahankan kapasitas operasional sekaligus menjaga legitimasi eksternal minimum. Kondisi ini membuka ruang bagi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, sekaligus mencerminkan praktik counter-hegemoni dalam merespons dominasi norma dan tekanan Barat dalam sistem internasional (Foreign Policy, 2023; Lowy Institute, 2023; Chachavalponpun, 2022)

Dalam konteks tersebut, dukungan Rusia terhadap Myanmar pasca kudeta 2021 tidak dapat dipahami semata sebagai kelanjutan hubungan bilateral rutin atau transaksi persenjataan konvensional. Dukungan Rusia terhadap Myanmar pasca kudeta 2021 tidak dapat dipahami semata sebagai kelanjutan hubungan bilateral rutin atau transaksi persenjataan konvensional. Dalam kerangka analisis neo-Gramscian yang dikembangkan oleh Robert W. Cox, hubungan internasional dipandang sebagai arena kontestasi struktur kekuasaan historis yang menopang hegemoni tertentu. Dari perspektif ini, intensifikasi hubungan Rusia–Myanmar mencerminkan praktik counter-hegemoni yakni upaya menantang dominasi normatif dan institusional Barat melalui pembentukan jaringan kekuatan alternatif di luar orbit liberal (Cox, 1983).

Dukungan militer Rusia berfungsi sebagai mekanisme perlawanan terhadap instrumen hegemonik Barat. Sanksi ekonomi dan embargo senjata yang diberlakukan negara-negara Barat dirancang untuk melemahkan kapasitas koersif junta serta meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan militer. Namun, keberlanjutan transfer persenjataan, dukungan teknis, dan pelatihan dari Rusia secara langsung mengurangi efektivitas tekanan tersebut. Dengan tetap terjaminnya pasokan alutsista dan peningkatan kapasitas militer, junta mampu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Dalam perspektif neo-Gramscian yang dikembangkan oleh Andreas Bieler dan Adam David Morton, tindakan ini merepresentasikan bentuk perlawanan material terhadap struktur hegemonik yang berupaya memaksakan kepatuhan melalui instrumen ekonomi dan diplomatik (Bieler & Morton, 2004)

Lebih jauh, kerja sama tersebut membentuk dasar bagi terbentuknya blok alternatif di luar tatanan liberal Barat. Bagi Antonio Gramsci, hegemoni tidak hanya bertumpu pada dominasi koersif, tetapi pada pembentukan “blok historis” yang mengintegrasikan kekuatan material, institusi, dan legitimasi normatif. Melalui kemitraan pertahanan, kerja sama energi, dan dukungan diplomatik, Rusia secara bertahap membangun jaringan relasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada struktur liberal Barat. Dalam kerangka yang juga dibahas oleh Stephen Gill, dinamika ini menunjukkan upaya pembentukan konfigurasi kekuatan global alternatif yang menantang tatanan neoliberal dominan (Gill, 1990)

Strategi tersebut juga memiliki dimensi normatif yang kuat. Rusia secara konsisten menekankan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam merespons krisis Myanmar, yang secara implisit menandingi klaim universal demokrasi liberal dan intervensi berbasis hak asasi manusia. Narasi ini berfungsi sebagai tandingan terhadap model modernisasi Barat. Dalam konteks perdebatan mengenai alternatif terhadap model Barat sebagaimana dibahas oleh David C. Kang dan Suisheng Zhao, pendekatan Rusia dapat dipahami sebagai upaya meredefinisi standar legitimasi politik internasional melalui penegasan kedaulatan absolut. Ini merupakan bentuk counter-hegemoni pada level ideologis—yakni kontestasi atas norma dan nilai yang mendasari tatanan global (Kang, 2007; Zhao, 2010).

Dalam dimensi geopolitik yang lebih luas, strategi Rusia terhadap Myanmar juga berkaitan dengan dinamika pasca memburuknya hubungan Moskow dengan Barat, terutama setelah konflik Ukraina. Analisis Andrei P. Tsygankov dan Roy Allison menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia dalam dekade terakhir ditandai oleh dorongan untuk mempertahankan status dan otonomi strategis di tengah tekanan Barat. Dalam konteks tersebut, dukungan terhadap Myanmar tidak semata oportunistik, tetapi merupakan bagian dari reposisi strategis Rusia dalam sistem internasional yang semakin multipolar dan terfragmentasi (Tsygankov, 2015; Allison, 2014).

Dengan demikian, kerja sama Rusia–Myanmar merepresentasikan tiga dimensi counter-hegemoni secara simultan: perlawanan material terhadap sanksi, pembangunan jaringan alternatif

di luar orbit liberal, dan promosi norma tandingan berbasis kedaulatan. Seperti yang ditegaskan oleh Joseph S. Nye Jr. mengenai pentingnya dimensi ideasional dalam kekuasaan global, serta oleh Yanzhong Huang dalam pembahasan mengenai transformasi tata kelola global non-Barat, dinamika ini tidak serta-merta menggantikan hegemoni liberal, tetapi menunjukkan fragmentasi dan kompetisi yang semakin nyata dalam struktur kekuasaan global kontemporer (Nye, 2004; Zhong, 2022)

Dinamika ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam tatanan internasional kontemporer. Tatanan internasional kontemporer tidak lagi berada dalam konfigurasi hegemonik yang sepenuhnya solid. Upaya negara-negara Barat memanfaatkan sanksi ekonomi, embargo senjata, dan tekanan diplomatik sebagai instrumen untuk menegakkan norma demokrasi menghadapi keterbatasan signifikan ketika terdapat kekuatan besar yang menawarkan dukungan alternatif. Dalam analisis G. John Ikenberry, hegemoni liberal pasca-Perang Dingin memang membentuk suatu tatanan institusional yang relatif stabil, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada konsensus dan legitimasi global. Ketika konsensus tersebut terfragmentasi dan muncul pusat-pusat kekuatan alternatif, efektivitas hegemoni liberal menjadi semakin terbatas (Ikenberry, 2011).

Kasus Myanmar menunjukkan bahwa sanksi bukanlah instrumen yang bersifat absolut. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert A. Pape, efektivitas sanksi ekonomi sangat bergantung pada tingkat isolasi dan ketergantungan negara target terhadap sistem ekonomi internasional yang dikendalikan oleh kekuatan hegemonik. Ketika negara target memiliki akses terhadap jaringan kemitraan alternatif seperti dukungan militer dan diplomatik dari Rusia, maka isolasi internasional menjadi relatif. Situasi ini mencerminkan pergeseran dari tatanan unipolar pasca-Perang Dingin menuju dinamika multipolar yang lebih kompetitif, di mana norma dan distribusi kekuatan tidak lagi dimonopoli oleh satu blok dominan (Pape, 2005).

Lebih lanjut, keterlibatan Rusia dalam krisis Myanmar memperlihatkan bahwa rivalitas global tidak hanya berlangsung di kawasan yang secara tradisional dianggap strategis seperti Eropa Timur atau Timur Tengah, tetapi juga merambah ke Asia Tenggara. Menurut Amitav Acharya, tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat tengah mengalami transformasi dengan munculnya aktor-aktor non-Barat yang semakin percaya diri membentuk norma dan institusi alternatif. Sementara itu, analisis Ian Storey menunjukkan bahwa Asia Tenggara menjadi arena kompetisi kekuatan besar yang semakin intens. Dalam konteks ini, Myanmar menjadi contoh bagaimana krisis domestik dapat bertransformasi menjadi titik temu kepentingan geopolitik global (Acharya, 2014; Storey, 2021).

Dalam perspektif neo-Gramscian yang dikembangkan oleh Robert W. Cox dan diperkaya oleh Mark Rupert, fenomena tersebut menggambarkan kemunculan praktik counter-hegemoni yang bersifat gradual dan strategis. Rusia tidak secara langsung menggantikan tatanan liberal, melainkan mengikis efektivitasnya melalui pembangunan jaringan relasi alternatif serta promosi norma kedaulatan sebagai tandingan terhadap intervensionisme liberal. Proses ini menunjukkan adanya kompetisi berkelanjutan atas legitimasi, institusi, dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional (Cox, 1987; Rupert, 2000).

Implikasi dari dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan Rusia–Myanmar pasca kudeta 2021 tidak hanya relevan dalam konteks bilateral, tetapi juga mencerminkan perubahan struktural dalam politik global menuju tatanan yang lebih plural dan kompetitif. Dalam kerangka yang dibahas oleh Andrew Hurrell dan Barry Buzan, sistem internasional kontemporer semakin ditandai oleh fragmentasi norma dan munculnya berbagai pusat kekuatan alternatif (Buzan, 2004; Hurrell, 2007).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penggunaan data sekunder membatasi kemampuan untuk menangkap dinamika internal pengambilan keputusan secara langsung di tingkat elite politik Rusia dan Myanmar. Kedua, fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada dimensi negara belum sepenuhnya mengakomodasi peran aktor non-negara maupun dinamika domestik yang lebih kompleks dalam membentuk kebijakan luar negeri.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui studi komparatif dengan kasus negara lain yang mengalami tekanan serupa, atau dengan mengintegrasikan metode kualitatif lanjutan seperti

wawancara elit dan analisis proses. Selain itu, eksplorasi terhadap peran aktor non-negara dan dinamika regional yang lebih luas juga penting untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik counter-hegemoni dalam sistem internasional yang semakin multipolar.

KESIMPULAN

Kerja sama Rusia–Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sekadar bersifat pragmatis, melainkan merepresentasikan praktik counter-hegemoni dalam sistem internasional kontemporer. Melalui dukungan militer, perlindungan diplomatik, dan perluasan kerja sama strategis, Rusia memanfaatkan fragmentasi global untuk menantang efektivitas tekanan Barat terhadap junta Myanmar. Analisis penelitian ini menegaskan bahwa strategi Rusia mencerminkan tiga dimensi utama counter-hegemoni, yaitu resistensi terhadap tekanan hegemonik, pembangunan jaringan alternatif di luar struktur liberal, serta promosi norma kedaulatan dan non-intervensi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas hegemoni liberal sangat bergantung pada konsensus global, dan ketika konsensus tersebut melemah, ruang bagi kekuatan alternatif semakin terbuka. Secara lebih luas, dinamika ini mengindikasikan pergeseran menuju tatanan internasional yang lebih kompetitif dan multipolar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perbandingan dengan kasus serupa di kawasan lain atau memperluas analisis pada peran aktor non-negara dan dinamika domestik, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik counter-hegemoni dalam politik global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *The end of American world order*. Polity Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 54–68.
- ASEAN. (2021). *ASEAN Statistical Yearbook 2021*. Website: ASEAN.
- Atkinson, P., Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2000). *Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical Handbook for Social Research*. Sage Publications.
- Atsetya, E. C., & Damayanti, R. (2025). Transformasi Peran NATO Dalam Menanggapi Ancaman Rusia Pasca Invasi Ke Ukraina: Tinjauan Geopolitiik Dan Keamanan Kolektif. *Jurnal Riset Studi Multidisiplin*, 9(7), 52–68.
- BBC News. (2021). *Myanmar Coup: Military Seizes Power in Coup on Day of New Parliament*. Publisher Website BBC News.
- BBC News. (2022). *Myanmar's Min Aung Hlaing visits Russia amid Western sanctions*. Rajagrafindo Persada.
- Bieler, A., & Morton, A. D. (2004). A Critical Theory Route to Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International Relations. *Capital & Class*, 28(1), 85–113. <https://doi.org/10.1177/030981680408200106>
- Bieler, A., & Morton, A. D. (2023). *Critical Theory and Global Capitalism*. In S. Gill (Ed.), *Global Governance and Governance*. Routledge.
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society?: English School Theory and the Social Structure of Globalisation*. Cambridge University Press.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Caballero-Anthony, M. (2023). Conflict Management and Atrocity Prevention in Southeast Asia: Making asean “Fit for Purpose.” *Journal of International Peacekeeping*, 26(2–3), 235–257. <https://doi.org/10.1163/18754112-26020008>
- Cox, R. W. (1987). *Production, Power, and World Order: Social Forces in The Making of History*. Columbia University Press.
- European Council. (2021). *EU Sanctions Against Myanmar Military*. Consilium.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2(1), 121–154.
- Freeman, J. D. H. R. (1986). Myanmar's Geopolitical Significance. *The Journal of Asian Studies*, 45(2), 121–154.

- Giles, J. (2023). The Interrelationship between Freedom of Thought, Conscience, and Religion and the Rule of Law. *Journal of Law and Religion*, 38(3), 376–402. <https://doi.org/10.1017/jlr.2023.28>
- Gill, R. (1990). *Political Economy and The Changing Global Order*. New York : St. Martin's Press.
- Gill, S. (. (1993). *The Global Political Economy of The New World Order*. McGraw-Hill Companies, Incorporated.
- Gramsci, A. (1971). *Selections From The Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Haacke, J. (2023). *ASEAN and Conflict Management*, in Dosch, J, and Kliem, F. (eds) *The Elgar Companion to ASEAN* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited). Edward Elgar Publishing.
- Hart. (2023). *Doing a literature review: Releasing The Research Imagination*. Torossah Publisher.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Hurrell, A. (2007). *One world? Many worlds: The Place of Regions in The Study of International Society*. Oxford University Press.
- Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal Leviathan : The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*. Princeton University Press CN - JX.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence*. Longman is an Imprint of Pearson.
- Kumar, P., & Kumar, P. (2025). Myanmar as a Battleground : India – China Rivalry and the Future of the Indo-Pacific. *Anusandahanvallari*, 2025(1), 3252–3257.
- Lakshmanan, M., Mala, G. S. A., Poorni, R., Ilamurugan, G., Sriramkumar, R., & Gnanavel, R. (2024). Blockchain for Secure and Efficient Crowdfunding: An Optimized Particle Swarm Approach. *2024 9th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES)*, 3(2), 848–854. <https://doi.org/10.1109/ICCES63552.2024.10860104>
- Lankov, A. (2022). *Russia and China in Myanmar: Strategic partnership*. Asia Times.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2023). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Lucas, J. (2024). Strategy in Action: The Creation of the Codex. *Undergraduate Honors Theses*, 3(2), 121–154.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. Norton.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2024). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Morton, A. (2007). *Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy*. Pluto Press.
- Mosyakov, D. V., Shpakovskaya, M. A., & Ponka, T. I. (2024). Myanmar's Role in China's Belt and Road Initiative. *Vestnik RUDN. International Relations*, 24(3), 439–449.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. PublicAffairs.
- Pape, R. A. (2005). Why Economic Sanctions Do Not Work. *International Security*, 22(2), 12–14.
- Patrick, S., Adebajo, A., Dayal, A., Gowan, R., & Guihong, Z. (2023). UN Security Council Reform: What The World Thinks. *Carnegie Endowment for International Peace*. Accessed January, 5(2), 121–154.
- Pedersen, M. B. (2021). Imposing Sanctions on Myanmar Military Leaders. In D. Singh & T. H. Hoang (Eds.), *Southeast Asian Affairs 2021* (pp. 235–253). ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://www.cambridge.org/core/product/B964A40BB70D8C2D71142DCEE86DA62>
- Perry, K. (1991). Better For Whom? Sanction Type and The Gendered Consequences For Women. *International Relations*, 36(2), 151–175. <https://doi.org/10.1177/00471178211018843>
- Radio Free Asia. (2023). *Russia-Myanmar Military Ties Deepen Despite International Condemnation*. Intermedia Jakarta.
- Reuters. (2022). *Russia, Myanmar Sign Military Cooperation Agreement*. Repository Journals.
- Rosatom, R. (2023). *A Myanmar Miscellany: Selected Articles, 2007-2023*. ISEAS - Yusof Ishak

- Institute.
- Rupert, M. (2000). *Ideologies of Globalization: Contending Visions of a New World Order*. Routledge.
- Saunders, P. J. (2024). Russia's Global Energy Role: War, Sanctions, and the Energy Transition. *Journal of Operations Management*, 2(1), 54–95.
- Sinclair, S., Blais, M., Gansler, D., Sandberg, E., Bistis, K., & Locicero, A. (2010). Psychometric Properties of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Overall and Across Demographic Groups Living Within the United States. *Evaluation & the Health Professions*, 33(5), 56–80. <https://doi.org/10.1177/0163278709356187>
- SIPRI. (2022). *Trends in International Arms Transfers 2021*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Stent, D. (2024). From 'Marching North' to 'De Facto Absorption': An Interpretive Historiography of South Korea's Unification Policies from 1948 until 2013. *Pen Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington.*, 32(3), 167–186. <https://doi.org/10.26686/wgtn.27871323>
- Storey, I. (2021). Southeast Asia in the US-China Competition. *Strategic Studies Quarterly*, 15(2), 121–154.
- Weatherley, A. H., Gill, H. S., & Casselman, J. M. (1987). *The Biology of Fish Growth*. Academic Press.
- Yin, J. (2024). Research on The Role Transformation of German Teachers in Universities From The Perspective of The " Creativity and Innovation " of Excellent Traditional Chinese Culture : A Qualitative Analysis Based on MAXQDA Pro 2024. *School of European Languages and Cultures*, 2(1), 15–19. <https://doi.org/10.62639/sspjies03.20240106>
- Zakaria, F. (2008). *The Post-American World*. Allen Lane.
- Zhong, Y. (2022). The Rise Of The Rest: Non-Western Powers and The Transformation of Global Governance. *Global Governance*, 28(2), 121–154.